

Peran FT UMJ dan Lembaga Aisiyah Dalam Penanganan Perlindungan Pada Perempuan dan Anak di Wilayah DKI Jakarta

Fadwah Maghfurah¹, Yana Adharani², Riza Samsinar³, Ummul Habibah⁴, Iusi
Andriyani⁵

^{1,2,3,4}Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Program Studi Teknik Mesin Jalan
Cempaka Putih no 27 Jakarta 10510

⁵Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl KH Ahmad Dahlan, Cirendeu
15412

*E-mail koresponden: fadwah.maghfurah@umj.ac.id

ABSTRAK

Pada era sekarang ini semakin banyak terjadi kasus perundungan kepada anak dan perempuan, maka Sesuai dengan konsep pemberdayaan kepada masyarakat dan perguruan tinggi maka Lembaga seperti Aisiyah menjadi salah satu pintu masuk yang menjadi rekan pemerintah untuk membantu menggerakkan dan membangun kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya di dalam perlindungan perempuan dan anak. Tetapi belum banyaknya informasi di masyarakat bahwa ada sebuah Lembaga yaitu Aisiyah yang bias membantu penanganan kasus seperti ini, Tujuan awal dimulai dengan mendata anggota Aisiyah yang ditunjuk sebagai fasilitator untuk menangani kasus aduan, lalu membuat SOP (standar operating prosedur), selanjutnya mengadakan penyuluhan kepada para pelapor serta advokasi untuk masyarakat. Metode yang dilakukan dengan mengikuti BIMTEK (Bimbingan Teknis) yang diselenggarakan oleh KEMENPPA, lalu mendata semua anggota dimana anggota ini adalah sebagian volunteer para pendidik di FT UMJ, lalu membuat SOP dan WEB khusus Aisiyah dan disebarluaskan melalui media social, plamplet atau brosur, serta metode terakhir mendampingi atau advokasi kepada masyarakat mulai dari mereka mengajukan aduan lalu mengawal serta memutuskan apakah harus ditangani sendiri atau harus bekerjasama dengan polisi, rumah sakit, dinsos, bakum dan P2APK. Hasil dari ini semua adalah data telah lengkap dan terecord yaitu total anggota fasilitator sebanyak 7 orang, SOP telah di publish di media social, penyuluhan kepada masyarakat sudah terlaksana dan tentunya para pelapor yang mengalami perundungan telah mendapatkan keadilan.

Kata kunci: FT UMJ, Aisiyah, SOP, Masyarakat.

ABSTRACT

In the current era, there are more and more cases of bullying against children and women, so in accordance with the concept of empowerment for the community and universities, institutions such as Aisiyah are one of the entry points that become partners with the government to help mobilize and build community empowerment activities, especially in the protection of women and child. However, there is not much information in the community that there is an institution, namely Aisiyah, which can help handle cases like this. The initial goal is to start by registering Aisiyah members who are appointed as facilitators to handle complaint cases, then making SOPs (standard operating procedures), then holding counseling to the members, reporting and advocating for the community. The method used is by following BIMTEK (Technical Guidance) organized by KEMENPPA, then registering all members, where these members are some of the educators' volunteers at FT UMJ, then making SOPs and a special WEB for Aisiyah and distributing them via social media, plamplets or brochures, as well as methods. Lastly, assisting or advocating for the community starting from when they file a complaint, then overseeing and deciding whether it should be handled alone or if they should collaborate with the police, hospitals, social

services, Bakum and P2APK. The result of all this is that the data is complete and recorded, namely a total of 7 facilitator members, SOPs have been published on social media, outreach to the community has been carried out and of course the complainants who experienced bullying have received justice.

Keywords : FT UMJ, Aisiyah, SOP, Public

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak seringkali terjadi, sehingga hampir tiap hari muncul berita mengenai kasus-kasus tersebut. Baik itu melalui koran, televisi maupun internet. Kekerasan yang dilakukan terhadap anak sangat beragam. Mulai dari memukul, menyiksa bahkan sampai dengan menghilangkan nyawa anak. Kekerasan tersebut terkadang dilakukan oleh guru, kadang dilakukan oleh tetangga. Bahkan dilakukan oleh pihak keluarga sendiri, dan tidak jarang juga dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Motif kekerasan tersebut juga sangat beragam. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Ada yang karena kesal terhadap tingkah lakunya, ada juga karena beban hidup dan ekonomi. Bahkan ada pula yang dikarenakan malu memilikinya karena merupakan hasil hubungan di luar nikah.

Lembaga Aisiyah yang berada dibawah naungan MUHAMMADIYAH ini bekerja sama dengan tenaga pendidik di Muhammadiyah sebagai mediator & fasilitator, dalam hal ini untuk membenahi pendataan serta membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) agar semua layanan menjadi jelas dan terekap per-kasus sesuai dengan pembagian klaster-klaster kasus yang terjadi. Tenaga pendidik ini juga menjadi anggota serta pengurus Aisiyah tingkat Wilayah DKI JAKARTA dan sebagai wadah yang memiliki ilmu pengetahuan serta jejaring ke pemerintah seperti kepolisian, rumah sakit serta Lembaga hukum yang tentunya mampu mengaplikasikan ilmu yang dimiliki bagi masyarakat agar memiliki kemanfaatan dan menjadi amal jariyah. Untuk itu salah satu tri dharma pengabdian kepada masyarakat (PKM) sangat sesuai dengan tuntunan agama islam. Sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat, selain itu juga sebagai penggerak dan membangun kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

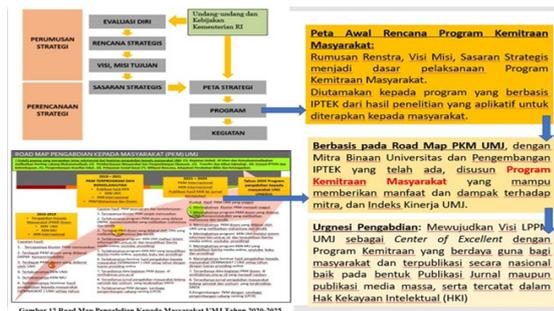
(Hasyim, Ashma, Setiawan, Cakrawala, & Salsabila, 2021)

Kegiatan kemitraan dimulai tahun ini yaitu pada tahun 2023 melalui bimbingan teknis kepada para calon mediator yang akan menangani setiap kasus aduan yang diadakan dan diarahkan oleh kementerian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), melalui program pembinaan, penyuluhan dan pelaporan para korban dan Pengabdian Masyarakat melalui pendanaan Kemenbudristek Dikti, dalam kegiatan tersebut telah berhasil dibangun Lembaga penanganan kasus perudungan kepada perempuan dan anak.

Dari rumusan permasalahan ini, maka dibuat tujuan dari program kemitraan masyarakat ini adalah :

1. Membuat pendataan para Fasilitator yang ada di Aisiyah akan menangani setiap kasus aduan kekerasan pada perempuan dan anak
2. Memberikan peningkatan pelayanan dengan memfasilitasi Lembaga Aisiyah melalui fasilitator tempat pengaduan agar data pengaduan sesuai dengan SOP atau prosedur pengaduan melalui pengadaan penyuluhan kepada para pelapor
3. Advokasi atau pendampingan kepada masyarakat yang telah melapor (korban kekerasan)

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini disusun berdasarkan Renstra Pengabdian kepada masyarakat (PKM) LPPM UMJ (Hendrawati, et al., 2020) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dosen. Di bawah ini disajikan gambaran keterkaitan antara kebijakan, arah pengabdian UMJ, serta roadmap pengabdian LPPM UMJ. Dimana dengan gambaran ini diharapkan menjadi acuan pengembangan PKM yang membawa dampak terhadap masyarakat dan Indeks Kinerja Universitas (IKU)



Gambar 1. Roadmap Abdimas

Seperti yang telah diuraikan, permasalahan utama mitra adalah belum banyaknya masyarakat yang melaporkan kasus yang terjadi di sekitar mereka dan di tambah pula belum adanya info mereka dengan adanya Lembaga Aisiyah yang bisa menjembatani kejadian yang terjadi dengan pihak pemerintahan sehingga masalah yang terkecil sampai yang terbesar pun bisa ditangani sampai tuntas. Berdasar latar belakang yang telah disampaikan, maka **rumusan masalah** yang dapat dibuat adalah :

1. Bagaimana memberikan pelayanan kepada korban yang mengalami perudungan dengan memanfaatkan Lembaga Aisiyah khususnya di divisi pendataan dan riset data serta Lembaga penanganan Hukum?
2. Bagaimana cara menangani kasus tersebut agar dapat diidentifikasi penyebab dan efek yang ditinggalkan pasca kejadian?
3. Bagaimana mencari solusi atas kejadian tersebut agar para korban perudungan serta pelecehan ini tidak mengalami traumatis mendalam?

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang direncanakan di awal adalah :

Dengan mengikutsertakan para fasilitator pelatihan berupa BIMTEK (Bimbingan teknis) yang diselenggarakan oleh KEMENPPA (Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak) dimana fasilitator yang dimaksud disini adalah sebagian besar para pendidik fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sukarela menjadi anggota serta pengurus di Aisiyah, juga ada juga diluar pendidik yang menjadi anggota serta pengurus

Aisyah, Bimbingan Teknis yang diadakan oleh KEMENPPA ini diadakan selama 3 (tiga) hari di hotel mercure Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 10 Propinsi yang tersebar di seluruh Indonesia dimana setiap Propinsi diwakili oleh 5(lima) peserta dari 3 lembaga yang terkait dengan kasus PPA (perlindungan Perempuan dan Anak) ini.

1. Mendata biodata baik anggota Aisyah ataupun fasilitator yang di tunjuk serta data pelapor yang masuk ke Pelaporan kasus
2. Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) langkah-langkah penanganan kasus dimulai dari pengaduan sampai selesai
3. Advokasi kepada masyarakat yang mengadukan kasusnya dimulai dari menganalisa kasus aduan, mengawal korban dengan cara melakukan visum secara visual ataupun non visual serta memutuskan apakah kasus ini akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih formal yaitu ke kepolisian, rumah sakit/puskesmas, P2PATK ataupun ke dinas social.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data fasilitator yang terkumpul yang khusus menangani Pendataan dan Rekam jejak kasus sebanyak 1 orang ketua, 1 sekretaris dan 5 orang anggota



Gambar 2. Peserta BIMTEK di Hotel Grand Mercure selama 3 Hari diikuti oleh 5 Provinsi

2. SOP (Standar Operasional Prosedur) telah siap di publish melalui media social sebagai berikut :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		No. Dok
KEGIATAN HARIAN		LPPA/PM/01/008
		Revisi
		01 Juni 2020
		Tgl. Revisi

Deskripsi:

1. Anggota PWA mendatangi Sekretariat Aisyiyah dan cek data via surat yang dikirim, media social ataupun berdasarkan kedatangan tamu yang akan melapor.
2. Bagian sekretariat memberikan formulir aduan kepada pelapor untuk dilengkapi.
3. Pelapor melengkapi formulir yang berisi data aduan. Data aduan terdiri dari:
 - a. Data pelapor.
 - b. Data korban.
 - c. Data teradu.
 - d. Kronologis kejadian.
4. Sekretariat Aisyiyah melakukan input data aduan.
5. Sekretariat Aisyiyah menyerahkan data aduan kepada bagian pelayanan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaga PPA) untuk ditindaklanjuti.

Gambar 3. SOP Kegiatan Harian Penanganan Kasus Perudungan PPA

Susunan organisasi dan pembagian tugas tim pengabdian kepada masyarakat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Pengabdian

No	Nama	Kepakaran	Uraian Tugas
1	Fadwah Maghfurah	Ketua Peneliti	Melaksanakan survey dan Membantu menganalisis
2	Yana Adharani ² ,	Anggota	Menganalisis permasalahan secara data
3	Riza Samsinar ³ ,	Anggota	Menganalisis berdasar kasus
4	Ummul Habibah ⁴ ,	Anggota	Tim yang menganalisis permasalahan berdasar wilayah
5	Lusi Andriyani	Anggota	Menganalisis permasalahan

Tabel 1. Keterakitan Rumusan Masalah, Solusi, Indikator Keberhasilan Program dan Target Luaran

NO	Masalah	Solusi	Indikator keberhasilan	Target Luaran
1	Banyak masyarakat yang belum tahu tentang keberadaan Lembaga Aisyiyah yang khususnya penangani tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Penyediaan koridor pelaporan sehingga masyarakat tidak langsung melaporkan kejadian ini langsung ke kepolisian atau bahkan hanya membiarkan masalah ini berlarut laruta tanpa adanya laporan Teknologi yang digunakan : Pemasangan pamphlet atau	Partisipasi masyarakat dalam melaporkan kegiatan sudah mulai mengalami Peningkatan antusias dalam pelaporan sehingga alurnya lebih terarah	1. Data pelaporan korban telah terekam dan tercatat 2. Data pelaporan di olah dan disalurkan kepada kepolisian atau rumah sakit , dinas sosial, PT2TK untuk ditangani 3. Publikasi Media Massa Nasional 4. Video dokumentasi kegiatan Terpublikasi pada lamanyoutube lppmumj

		media social yang menginfokan tentang keberadaan Lembaga penanganan Perempuan dan Anak ini		
2	Masyarakat belum mampu atau masih ragu-ragu untuk melaporkan kejadian perudungan ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan penyuluhan terkait kasus yang dialami 2. Membantu pemasaran produk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat partisipasi masyarakat (terukur dengan jumlah pelaporan) 2. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait cara pelaporan dan hasil yang akan di dapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah publikasi pada seminar nasional pengabdian masyarakat lppmumj 2. Publikasi pada media massanasional

Dari uraian solusi dan indikator keberhasilan yang telah dijabarkan pada table 1 di atas, selanjutnya dibuat

rumusan target capaian luaran. Target luaran yang akan dihasilkan disajikan dalam tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Target Capaian Luaran yang akan dihasilkan

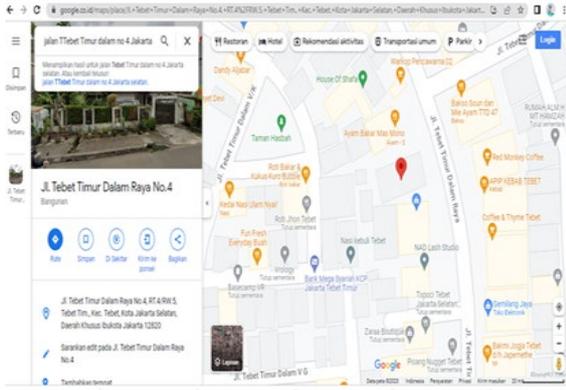
NO	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Borang KEMENPPA yang hasil nilai akhirnya berupa point keberhasilan bendataan pada tiap kasus aduan	Submite
2.	Artikel ilmiah dimuat di prosiding elektronik pada :Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (SEMNASKAT) LPPM UMJ	Submite
3.	Artikel di media masa cetak atau elektronik	Publish
4.	Dokumentasi pelaksanaan (Video kegiatan)	Publish pada kanal youtube LPPA
5.	Kekayaan Intelektual (KI)	<ol style="list-style-type: none"> a. HKI Poster PPA b. HKI Modul Pelatihan

Dari gambaran tahapan pelaksanaan program di atas, dibuat rumusan solusi yang diharapkan terstruktur dan sistematis sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang masih dihadapi mitra. GAMBARAN IPTEK HASIL PENELITIAN YANG AKAN DIDESIMINASIKAN Kegiatan PKM ini akan menggunakan IPTEK :

1. Utilitas penyediaan sarana gedung sebagai kantor sekretariat dan fasilitas komputer pada mitra
2. Penyediaan sarana media social sebagai info-info penyediaan penanganan kasus

3. Modul pelatihan strategi penanganan kasus perudungan perempuan dan anak
4. Pemanfaatan Instagram, facebook, twitter dan kanal youtube sebagai media informasi ke masyarakat
5. Penggunaan platform jejaring online seperti zoom, google meet dsb untuk berkoordinasi antar anggota pengabdian masyarakat maupun dengan penduduk

PETA LOKASI MITRA SASARAN



Gambar 4. Lokasi Gedung Aisyiah sebagai wadah tempat pelaporan

BORANG PENILAIAN PERSYARATAN (BPP)

KOMPONEN PERSYARATAN

Tabel 1. Komponen Persyaratan dalam Penilaian Berserta Nilai/Skoranya

NO.	PERSYARATAN	NILAI MAKSIMAL	NILAI WAJIB YANG HARUS DIPENUHI
A	KELEMBAGAAN	50	27
A.1	Dasar Hukum Pembentukan	20	7
A.2	Kebijakan	15	9
A.3	Struktur Organisasi	10	8
A.4	Perencanaan	5	3
B	SUMBER DAYA	60	34
B.1	Sumber Daya Manusia	20	10
B.2	Sarana dan Prasarana	30	18
B.3	Sumber Daya Anggaran	10	6
C	LAYANAN DAN PROGRAM	170	94
C.1	Penerimaan Permintaan	25	14
C.2	Identifikasi Layanan dan Program	30	22
C.3	Pelaksanaan Layanan dan Program	115	56
D	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	35	13
D.1	Pemantauan	15	6
D.2	Evaluasi	10	1
D.3	Pelaporan	10	6
Total		315	168

Gambar 5. Borang KEMENPPA sebagai acuan pembenahan data



Gambar 6. Kartu Keanggotaan Sebagian fasilitator PPA



Gambar 7. Suasana Pada saat Pelaporan Kasus



Gambar 8. Suasana Penyuluhan ke masyarakat



Gambar 9. Pamflet PPA

